

Menakar Efektivitas dan Pola Partisipasi Politik Pemilih Muda pada Pilpres 2024 di Kota Surabaya

Niken Larossa¹, Nisrina Tias Rahmanda², Echa Zazkia Putri³, Novi Putri Anggraini⁴
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Kota Surabaya, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nikenlarossa02@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 29-05-2026
Disetujui 07-06-2026
Diterbitkan 09-06-2026

ABSTRACT

The 2024 Presidential Election positioned young voters as the most dominant demographic group, with the combined share of Generation Z and Millennials exceeding 56 percent of the national electorate making their voices decisive in Indonesia's largest electoral contest in history. This study analyzes the patterns and effectiveness of young voters' political participation in the 2024 Presidential Election in Surabaya, using Miriam Budiardjo's theory of political participation as the analytical framework. A qualitative approach through library research was employed drawing on national journal articles, official KPU data, and relevant academic references. The findings reveal that young voters in Surabaya are not politically apathetic, but critical and selective political actors whose participation extends well beyond casting ballots into non-conventional digital engagement online political discourse, critical information sharing, and independent opinion formation. However, this potential remains suboptimal due to limited political literacy, widespread disinformation, and insufficient substantive voter education. The study further identifies a notable gap between the demographic dominance of young voters and their underrepresentation in local legislative institutions, underscoring that strengthening Surabaya's local democracy demands sustained investment in participatory political education and a healthier information ecosystem.

Keywords: Political Participation, Young Voters, 2024 Presidential Election, Miriam Budiardjo

ABSTRAK

Pemilihan Presiden 2024 menempatkan pemilih muda sebagai kelompok demografis paling dominan, dengan gabungan Generasi Z dan Milenial mencapai lebih dari 56 persen dari total pemilih nasional menjadikan suara mereka penentu arah kontestasi elektoral terbesar dalam sejarah Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola dan efektivitas partisipasi politik pemilih muda pada Pilpres 2024 di Kota Surabaya menggunakan kerangka teori partisipasi politik Miriam Budiardjo. Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan digunakan melalui analisis artikel jurnal nasional, data resmi KPU, serta referensi akademis relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilih muda Surabaya bukanlah kelompok apatis, melainkan aktor politik yang kritis dan selektif. Partisipasi mereka melampaui kehadiran di TPS dan meluas ke ranah non-konvensional berbasis digital diskusi politik daring, penyebaran informasi kritis, hingga pembentukan opini publik secara mandiri. Namun, potensi ini belum optimal akibat rendahnya literasi politik, banjir disinformasi, serta minimnya pendidikan pemilih yang substantif. Penelitian ini juga mengungkap kesenjangan antara dominasi demografis pemilih muda dan minimnya keterwakilan mereka di legislatif daerah, sehingga

penguatan demokrasi lokal Surabaya menuntut investasi berkelanjutan dalam pendidikan politik yang partisipatif dan ekosistem informasi yang sehat.

Katakunci: Partisipasi Politik, Pemilih Muda, Pilpres 2024, Miriam Budiardjo

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Larossa, N., Rahmanda, N. T. ., Putri, E. Z. ., & Angraini, N. P. . (2026). Menakar Efektivitas dan Pola Partisipasi Politik Pemilih Mudapada Pilpres 2024 di Kota Surabaya. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5341-5354. <https://doi.org/10.63822/a75ebq13>

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. (Budiardjo, 2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dalam kerangka teorinya, mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam dua kategori besar, yaitu partisipasi konvensional yang mencakup pemberian suara (voting), kampanye, dan lobi kepada pejabat pemerintah serta partisipasi non-konvensional, yang meliputi demonstrasi, penandatanganan petisi, hingga pembangkangan sipil. Lebih jauh, (Budiardjo, 2008) menegaskan bahwa efektivitas partisipasi politik tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik di bilik suara, melainkan juga mencakup sejauh mana keterlibatan warga negara tersebut mampu memengaruhi proses dan keluaran (output) kebijakan publik secara nyata. Dengan demikian, partisipasi politik bukan sekadar ekspresi hak sipil, melainkan juga merupakan cerminan dari kualitas keterlibatan warga negara dalam proses-proses demokratis yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024, yang sekaligus menjadi pemilu serentak terbesar dalam sejarah bangsa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 204,8 juta pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan proporsi pemilih muda usia 17–40 tahun mencapai lebih dari 52 persen dari total DPT nasional (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023). KPU melaporkan bahwa pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan proporsi 55 persen dari total pemilih, terdiri dari 33,60 persen generasi milenial dan 22,85 persen generasi Z. Fakta demografis ini menempatkan kelompok pemilih muda bukan sekadar sebagai objek mobilisasi kampanye, melainkan sebagai subjek penentu arah kontestasi elektoral yang memiliki daya ungkit strategis dalam menentukan hasil Pilpres. Namun, dominasi kuantitas tersebut tidak serta-merta berkorelasi positif dengan kualitas partisipasi mereka. Merujuk pada tipologi, kaum muda kerap memanasifestasikan keterlibatan politiknya melalui bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional berbasis digital seperti kampanye daring, petisi virtual, dan gerakan hashtag yang secara teoritis belum tentu menghasilkan efektivitas politik yang setara dengan partisipasi konvensional seperti pemberian suara secara langsung. Tingkat apatisisme politik, terutama di kalangan pemuda, disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, sementara upaya pemerintah dan KPU seperti sosialisasi di sekolah dan pemanfaatan media belum sepenuhnya efektif.

Kajian mengenai partisipasi politik pemilih muda di Indonesia telah mendapat perhatian yang semakin intensif dalam satu dekade terakhir. (Setiawan, 2023) mengkaji perilaku pemilih muda dalam menyambut Pemilu 2024 secara nasional dan menyimpulkan bahwa partisipasi pemilih muda dalam pemilu tetap dapat dimaknai sebagai bentuk kesadaran politik atau masih terjaganya tingkat kepercayaan pemilih muda terhadap pemerintahan atau sistem politik yang sedang berlangsung, dan pemilih muda saat ini juga lebih rasional dan kritis tentang pemimpin masa depan Indonesia. Namun penelitian tersebut bersifat makro dan tidak memfokuskan diri pada konteks kota tertentu maupun pada Pilpres secara spesifik. Di tingkat lokal Surabaya, (Prasetyawati & Satmoko Hadi, 2021) mengkaji perilaku pemilih pemula Surabaya dalam Pilkada 2020 pada masa pandemi, dan menemukan bahwa kondisi pandemi turut menekan pola dan intensitas partisipasi secara signifikan meski kajian ini terbatas pada konteks pilkada dalam situasi luar biasa yang tidak dapat diperbandingkan langsung dengan Pilpres 2024. Penelitian yang

lebih mutakhir oleh (Ayunda dkk., 2025) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Surabaya dalam Pilkada 2024, di mana angka partisipasi masyarakat Kota Surabaya hanya mencapai 56–60 persen, jauh di bawah target 75 persen yang ditetapkan KPU Surabaya namun penelitian ini mengkaji masyarakat umum tanpa mengisolasi pemilih muda sebagai subjek analisis utama. Di sisi psikologis, (Mensana & Lanang Sanjaya, 2020) mengkaji hubungan kepercayaan politik dan intensi memilih pada remaja Surabaya menjelang Pemilu 2019, namun pendekatannya lebih psikologis dibanding politis. Sementara (Sukma & Wardhani, 2018) mengkaji partisipasi pemilih pemula secara umum dengan perspektif pendidikan politik, tanpa secara eksplisit mengoperasionalkan teori Budiardjo sebagai kerangka analitik utama (Sukma & Wardhani, 2018).

Berdasarkan telaah literatur tersebut, tampak jelas bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa keterbatasan yang menjadi celah (gap) akademik. Pertama, sebagian besar kajian berfokus pada konteks pilkada atau pemilu legislatif, bukan Pilpres yang memiliki karakter partisipasi dan antusiasme publik yang berbeda. Kedua, kajian yang bersifat lokal Surabaya belum secara spesifik menginterogasi dimensi efektivitas partisipasi pemilih muda tidak sekadar kuantitasnya. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara konsisten dan sistematis menggunakan teori partisipasi politik Miriam Budiardjo sebagai kerangka analisis tunggal yang terintegrasi untuk mengkaji fenomena ini di Surabaya dalam konteks Pilpres 2024. Berangkat dari kesenjangan inilah penelitian ini hadir, dengan rumusan masalah: (1) bagaimana pola partisipasi politik pemilih muda pada Pilpres 2024 di Kota Surabaya ditinjau dari perspektif teori partisipasi Budiardjo, (2) sejauh mana efektivitas partisipasi politik tersebut dalam memengaruhi proses dan keluaran elektoral, dan (3) faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambatnya. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pemilih muda Surabaya cenderung menunjukkan pola partisipasi konvensional yang tinggi khususnya pemberian suara namun dengan efektivitas yang belum optimal dalam memengaruhi keluaran kebijakan, seiring dengan kecenderungan partisipasi non-konvensional berbasis digital yang lebih dominan namun tidak berimplikasi langsung pada perubahan kebijakan. Dengan menggunakan dimensi-dimensi partisipasi Budiardjo yakni pemberian suara, kegiatan kampanye, komunikasi dengan pejabat, dan keterlibatan dalam kelompok kepentingan sebagai pisau analitis, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola, menakar efektivitas, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk partisipasi politik pemilih muda dalam Pilpres 2024 di Kota Surabaya, guna memberikan kontribusi akademik bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena partisipasi politik pemilih muda di Kota Surabaya pada Pilpres 2024 secara mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh (Zed, 2004), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menggali makna di balik fenomena yang dikaji secara komprehensif tanpa harus melakukan penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis sumber literatur ilmiah yang relevan. Sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal nasional dari Google Scholar, data resmi KPU Kota Surabaya dan KPU RI, serta referensi akademis lain terkait partisipasi politik dan perilaku pemilih muda. Pemilihan literatur

mempertimbangkan relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan kemutakhiran data, dengan mayoritas publikasi dalam rentang 2021–2025. Analisis data mengikuti tiga tahapan dengan reduksi data (memilah literatur paling relevan), penyajian data (menyusun temuan secara sistematis berdasarkan tema utama), dan penarikan kesimpulan menggunakan teori partisipasi politik Miriam Budiardjo sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini mengakui keterbatasan ketersediaan data elektoral spesifik tingkat kota berdasarkan kelompok usia. Oleh karena itu, analisis mengandalkan data agregat resmi KPU serta temuan penelitian terdahulu sebagai data pembanding. Keterbatasan ini tidak mengurangi validitas analisis, mengingat tujuan penelitian adalah membangun pemahaman komprehensif melalui sintesis literatur yang telah terverifikasi secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilpres 2024 di Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik jika melihat bagaimana pemilih muda merespons kontestasi tersebut. Sebagai kota metropolitan dengan basis pemilih muda yang dominan, Surabaya menjadi panggung di mana berbagai literatur ilmiah dan data sekunder memperlihatkan adanya pergeseran pola perilaku memilih yang cukup signifikan. Melalui penelusuran studi pustaka, bab ini akan mendeskripsikan secara jernih mengenai temuan-temuan kunci terkait karakteristik elektoral pemuda di Surabaya, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan pisau analisis Miriam Budiardjo untuk memetakan sejauh mana efektivitas gerakan mereka, baik di ruang fisik maupun digital. Evaluasi dan penafsiran atas data-data tersebut dijabarkan melalui beberapa fokus pembahasan berikut.

1. Dinamika Elektoral dan Elemen Politik yang Memengaruhi Pemilih Muda

Dinamika Pilpres 2024 pada tingkat nasional, dibentuk oleh sejumlah elemen politik yang saling berinteraksi dan secara langsung berdampak pada preferensi pemilih muda. (Sahl & Mauluddin, 2024) mengidentifikasi setidaknya enam elemen konvensional yang dominan memengaruhi elektabilitas paslon, yaitu politik identitas, blunder politik, program kerja, aktor elite politik, gimmick dan sensasi publik, serta manuver politik. Tren survei dari berbagai lembaga kredibel pada akhir 2023 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran secara konsisten memimpin dengan elektabilitas antara 39 hingga 50 persen, sementara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersaing ketat di rentang 15 hingga 27 persen. Gimmick politik turut memainkan peran penting dalam membentuk citra dan kedekatan emosional paslon dengan pemilih muda. Fenomena "Gemoy" yang melekat pada Prabowo-Gibran berhasil membangun persepsi bahwa paslon tersebut merakyat dan menyenangkan, sementara Anies-Muhaimin melalui "Anies Bubble" berupaya mencitrakan kedekatan dengan anak muda yang kreatif dan melek digital. Gimmick yang paling efektif terbukti adalah yang tumbuh secara organik dari akar rumput dan bertahan lama di ruang digital, bukan yang diproduksi secara top-down oleh tim kampanye. Selain gimmick, peran elite politik juga tidak bisa diabaikan. Presiden Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik mencapai 78 hingga 82 persen sepanjang 2023 memberikan insentif elektoral besar bagi paslon yang berafiliasi dengannya melalui efek ekor jas, di mana pemilih muda yang puas dengan kepemimpinannya cenderung meneruskan dukungan kepada paslon yang dianggap sebagai kelanjutan dari warisan pembangunan tersebut (Sahl & Mauluddin, 2024). Dari sisi pemberitaan media, analisis wacana kritis dengan pendekatan Norman Fairclough terhadap lima portal berita nasional menunjukkan adanya kecenderungan media untuk memosisikan

pemilih muda sebagai subjek utama yang diperebutkan dalam Pemilu 2024. Framing yang dibangun menitikberatkan peran Gen Z dan milenial sebagai penentu kemenangan dengan lebih dari 60 persen suara, sekaligus menyoroti kerentanan mereka terhadap banjir informasi politik yang tidak terseleksi dengan baik (Jamil et al., 2024). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pendidikan pemilih bukan sekadar soal teknis mencoblos, melainkan mencakup kemampuan literasi media dan berpikir kritis terhadap konten politik yang dikonsumsi sehari-hari. Dalam konteks ini, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya kini menjadi sarana utama penyebaran informasi politik bagi generasi muda. Konten politik yang disajikan secara visual, singkat, dan interaktif terbukti lebih mudah diterima dibandingkan media konvensional karena lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi Generasi Z. Namun demikian, algoritma media sosial juga berpotensi membentuk ruang gema yang membuat pengguna hanya menerima informasi sesuai preferensi tertentu, sehingga kemampuan berpikir kritis tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (Maira dkk., 2025). Penelitian kuantitatif menggunakan regresi logistik biner terhadap 271 responden pemilih muda di Kota Medan mengungkapkan bahwa dari dua belas variabel yang diuji, hanya enam yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih, yakni sosial budaya, usia, rekam jejak kandidat, isu politik, kampanye, dan hasil debat (Husniyah dkk., 2024). Menariknya, variabel usia memiliki arah hubungan negatif, artinya semakin muda usia seseorang justru semakin besar kemungkinannya untuk berpartisipasi, karena pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya cenderung lebih antusias untuk terlibat. Sementara itu, variabel seperti tingkat pendidikan formal, paparan media sosial, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan kualitas kandidat secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini relevan dengan konteks Surabaya sebagai kota metropolitan, di mana pemilih pemula menunjukkan antusiasme yang tinggi meskipun kepercayaan institusional mereka terhadap penyelenggara pemilu belum sepenuhnya solid.

2. Kondisi dan Dinamika Pemilih Muda Surabaya di Pilpres 2024

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia memiliki karakteristik demografis pemilih yang unik dan strategis. Realitas elektoral di Kota Surabaya sepanjang Pilpres 2024 kemarin ditandai dengan pergeseran demografi pemilih yang didominasi oleh generasi muda. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi ruang di mana pemilih muda memiliki akses informasi yang sangat luas mengenai rekam jejak maupun program kerja para paslon. Kondisi objektif ini memicu dinamika politik lokal yang cukup cair, di mana pemuda tidak lagi sekadar menjadi objek mobilisasi suara, melainkan kelompok yang aktif memperbincangkan politik. Hal ini terlihat dari bagaimana isu-isu nasional direspons secara cepat melalui diskusi di media sosial maupun komunitas lokal di Surabaya. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.218.586 pemilih, mengalami peningkatan sebesar 86.803 orang dibandingkan Pemilu 2019 yang tercatat sebanyak 2.131.756 pemilih (KPU KOTA SURABAYA, 2023). DPT tersebut tersebar di 31 kecamatan dan 153 kelurahan, dengan total 8.167 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika dibedah berdasarkan klasifikasi usia, struktur Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Surabaya sebenarnya masih menempatkan kelompok masyarakat berusia di atas 40 tahun sebagai porsi terbesar, yakni mencapai 51,5 persen atau setara dengan 1.142.452 jiwa. Posisi ini kemudian diikuti oleh kelompok pemilih matang dalam rentang usia 31 hingga 40 tahun yang menyumbang angka sebesar 19,7 persen atau sebanyak 436.654 orang. Sementara itu, kelompok pemilih muda yang berada pada rentang usia 17 sampai 30 tahun menempati porsi yang cukup krusial dalam peta

elektoral kota ini (Pradana, 2023). Meskipun secara akumulasi angka mereka berada di bawah kelompok usia senior, keberadaan pemilih muda dalam rentang usia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kelompok ini menjadi poros dinamika pemilu karena karakteristik mereka yang cenderung lebih vokal, adaptif terhadap teknologi informasi, dan belum memiliki pola afiliasi politik yang kaku. Akibatnya, kelompok usia 17 sampai 30 tahun ini sering kali menjadi penentu (*swing voters*) yang dikejar oleh para kontestan politik, mengingat preferensi memilih mereka yang masih sangat cair dan mudah bergeser tergantung pada isu kontemporer yang berkembang di ruang publik Surabaya. Kecenderungan demografis di tingkat lokal tersebut nyatanya merefleksikan konstelasi politik di tingkat nasional. Data yang dirilis oleh KPU RI menegaskan bahwa lanskap Pemilu 2024 memang panggunanya generasi muda, di mana persentase gabungan antara Generasi Z dan Milenial menembus angka 56,45 persen dari keseluruhan 204.807.222 pemilih di Indonesia. Secara rinci, Generasi Milenial (kelahiran 1980–1994) memegang kendali utama dengan porsi 33,60 persen atau sekitar 68.822.389 jiwa, yang kemudian disusul oleh Generasi Z (kelahiran 1995 hingga era 2000-an) yang menyumbang 22,85 persen atau setara dengan 46.800.161 suara (Ramadhan, 2023). Akumulasi mayoritas suara ini menjadi bukti empiris bahwa arah kebijakan dan strategi kampanye pada Pilpres kemarin mau tidak mau harus bergeser untuk mengakomodasi preferensi politik kedua generasi tersebut. Menariknya, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma berpikir yang cukup signifikan di kalangan pemuda. Pemilih pemula di Kota Surabaya nyatanya menampilkan sikap yang skeptis, namun sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok yang apatis terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. Karakteristik ini dibuktikan melalui tingginya antusiasme serta kepemilikan literasi politik yang memadai, di mana mereka secara aktif mengkritisi tujuan, substansi rencana, hingga arah kebijakan struktural yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden (Winokan dkk., 2024). Kelompok pemuda di Surabaya cenderung menggunakan rasionalitasnya untuk menimbang kelogisan dari visi, misi, dan program kerja yang dikampanyekan, guna memilah apakah janji-janji tersebut dapat direalisasikan secara konkret atau hanya sebatas narasi delusional yang berlebihan demi meraup simpati publik. Di samping itu, sikap kritis ini juga merefleksikan cara pandang pemilih pemula yang visioner terhadap masa depan keberlangsungan roda pemerintahan. Dibandingkan hanya melihat popularitas figur di permukaan atau sekadar mengikuti tren di media sosial, mereka justru lebih mengutamakan analisis mendalam terhadap rekam jejak (*track record*) objektif dari para kandidat. Kesadaran politik yang matang ini lahir dari keinginan kolektif agar masa depan instansi negara dapat dipimpin oleh figur pemimpin yang kompeten, bersih, serta mampu menyelesaikan berbagai sengkabut permasalahan dan keresahan riil di tengah masyarakat secara efektif dan efisien. Pola perilaku memilih yang berbasis pada evaluasi rasional seperti inilah yang kemudian menjadi warna baru dalam dinamika elektoral urban di Kota Surabaya sepanjang pergelaran Pilpres 2024 kemarin.

3. Pola Partisipasi Politik Pemilih Muda: Konvensional vs Non-Konvensional (Analisis Miriam Budiardjo)

Menelaah bagaimana pemilih muda di Kota Surabaya mengekspresikan hak politiknya sepanjang Pilpres 2024 memerlukan pisau analisis yang mampu memetakan tindakan mereka, tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital. Pada ranah konvensional, bentuk keterlibatan formal seperti menghadiri kampanye fisik, mendengarkan debat publik, hingga tindakan paling mendasar yaitu datang ke (TPS) untuk mencoblos, tetap menjadi indikator utama kepatuhan elektoral mereka. Namun, pemilih muda Surabaya tidak lagi menempatkan jalur konvensional ini sebagai satu-satunya saluran politik. Seiring

dengan masifnya penetrasi teknologi, pola partisipasi non-konvensional justru menjadi ruang baru yang jauh lebih atraktif bagi Generasi Z dan Milenial di Surabaya. Pola non-konvensional ini tidak lagi mengandalkan mobilisasi massa di lapangan oleh partai politik, melainkan bergerak secara otonom melalui pemanfaatan media sosial, pembuatan konten kreatif, perang tagar, hingga aksi-aksi pengawalan isu kebijakan secara digital. Karakteristik kota metropolitan yang melekat pada Surabaya menyediakan infrastruktur internet yang mapan, sehingga mempermudah pemilih muda untuk mengorganisir diri secara mandiri tanpa sekat birokrasi formal.

Berdasarkan pemikiran (Budiardjo, 2008: 367), partisipasi politik pada hakikatnya dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kolektif untuk terlibat secara aktif dalam ranah politik. Keterlibatan aktif ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan jajaran kepemimpinan negara serta tindakan nyata baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang berorientasi pada intervensi dan pemengaruhan terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Melalui konseptualisasi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua dimensi krusial yang mendasari jalannya aktivitas politik, yakni adanya keterlibatan nyata dari warga negara serta adanya orientasi kuat untuk memengaruhi keputusan-keputusan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi tidak boleh hanya dipandang sebagai tindakan formalitas atau mobilisasi pasif semata. Sebaliknya, partisipasi politik yang substantif menuntut adanya tindakan sadar dari masyarakat yang bertujuan untuk mengintervensi, mengawal, ataupun mengoreksi arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas kekuasaan.

4. Faktor-Faktor yang Membentuk Partisipasi Politik Pemilih Muda Surabaya

Karakteristik Kota Surabaya sebagai kota metropolitan turut memengaruhi pola partisipasi politik generasi muda pada Pilpres 2024. Tingginya tingkat urbanisasi, akses terhadap pendidikan, serta penggunaan teknologi informasi yang masif membuat pemilih muda Surabaya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai informasi politik. Kondisi tersebut memungkinkan generasi muda tidak hanya berperan sebagai penerima informasi politik, tetapi juga sebagai aktor yang aktif menyebarkan informasi, memberikan opini, dan terlibat dalam diskusi politik melalui berbagai platform digital (Zulkarnain & Saufi, 2021) Meski demikian, faktor geografis dan lingkungan sosial tetap memberikan pengaruh tersendiri. Karakteristik wilayah tempat tinggal, kondisi sosial, serta lingkungan komunitas masih turut membentuk cara pandang generasi muda terhadap kandidat politik, isu publik, hingga pola keterlibatan mereka dalam pemilu (Nugroho dkk., 2024). Selain akses informasi, lingkungan sosial dan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih muda Surabaya. Sebagai kota pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi di Jawa Timur, Surabaya memiliki jumlah pelajar dan mahasiswa yang cukup besar. Lingkungan tersebut mendorong tumbuhnya budaya diskusi serta pertukaran gagasan politik yang relatif aktif. Akibatnya, banyak pemilih muda tidak lagi memilih berdasarkan kedekatan emosional semata, melainkan mulai mempertimbangkan program kerja, rekam jejak kandidat, isu politik, serta hasil debat publik sebagai dasar pengambilan keputusan politik (Husniyah dkk., 2024).

Namun demikian, tingginya akses terhadap informasi politik tidak selalu diikuti oleh tingginya kualitas literasi politik. Pemilih muda Surabaya masih menghadapi tantangan berupa banjir informasi yang beredar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Arus informasi yang sangat cepat sering kali menyulitkan pemilih muda dalam membedakan informasi yang faktual dengan yang bersifat manipulatif atau mengandung disinformasi. Hal ini diperparah oleh temuan yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda masih berada pada kategori pasif dalam keterlibatan politiknya, sehingga

strategi sosialisasi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya efektif menjangkau karakteristik Generasi Z (Febrianta dkk., 2025). Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi faktor penting dalam membentuk partisipasi politik yang berkualitas, di mana pemilih muda dituntut tidak hanya aktif mengonsumsi informasi politik, tetapi juga mampu melakukan verifikasi terhadap sumber informasi yang diperoleh sebelum menentukan pilihan politiknya (Jamil dkk., 2024). Pendidikan politik menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan mengenai prosedur pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi sekaligus mencegah sikap apatis di kalangan pemilih pemula (Hermanto dkk., 2025). Berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan mahasiswa, akademisi, maupun penyelenggara pemilu terbukti mampu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban politik mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa generasi muda pada dasarnya bukan kelompok yang apatis terhadap politik, melainkan membutuhkan pendekatan pendidikan politik yang lebih partisipatif dan sesuai dengan karakteristik mereka sebagai generasi digital (Hasan dkk., 2025). Dalam perspektif Miriam Budiardjo, kondisi tersebut menegaskan bahwa partisipasi politik pemilih muda Surabaya tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik (Budiardjo, 2008).

5. Faktor Pendorong dan Tantangan Partisipasi Politik Pemilih Muda

Partisipasi pemilih muda dalam Pilpres 2024 tidak hadir dalam ruang yang vakum. Ia dibentuk oleh berbagai faktor pendorong sekaligus dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang tidak ringan. Dari sisi faktor pendorong, setidaknya terdapat empat hal utama yang dapat diidentifikasi berdasarkan kajian literatur. **Pertama**, tingginya akses informasi digital. Sebagai digital natives, generasi Z dan milenial memiliki kemampuan mengakses informasi politik dari berbagai sumber secara cepat dan mandiri. Survei LIPI mencatat bahwa 60,6 persen generasi Z sangat sering mengakses berita politik melalui media sosial, sementara 53,8 persen berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih mendengarkan aspirasi mereka (Zulkarnain & Saufi, 2021). Kondisi ini menjadikan ruang digital sebagai arena mobilisasi kesadaran politik yang sangat efektif sekaligus rawan terhadap disinformasi. **Kedua**, relevansi isu yang diangkat oleh paslon. Penelitian menunjukkan bahwa isu politik yang menyentuh kepentingan langsung pemilih muda seperti lapangan kerja, pendidikan, isu lingkungan, dan kesehatan mental terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih (Husniyah dkk., 2024). Program kerja yang konkret dan programatik juga mampu menarik segmen swing voters yang mencapai sekitar 30 persen dari total pemilih (Sahl & Mauluddin, 2024). **Ketiga**, antusiasme pemilih pemula. Paradoks menarik ditemukan dalam data bahwa semakin muda usia seseorang justru semakin besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam pemilu, karena pemilih pemula yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya cenderung lebih bersemangat untuk terlibat dibanding yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu. **Keempat**, inisiatif pendidikan pemilih yang partisipatif. Berbagai program sosialisasi yang diselenggarakan secara dialogis terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih sekaligus menumbuhkan komitmen untuk berpartisipasi aktif. Pengalaman dari Gorontalo menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan akademisi dan komisioner KPU secara langsung mampu mendorong sikap kritis mahasiswa terhadap isu-isu politik (Hasan dkk., 2025). Hal serupa ditemukan dalam kegiatan sosialisasi di Surabaya yang diselenggarakan bersama KPU Jawa Timur, di mana antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa generasi muda

sejatinya tidak apatis, melainkan hanya membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan cara mereka berpikir dan berkomunikasi (Muthowif dkk., 2025).

Di sisi tantangan, persoalannya tidak kalah kompleks. **Pertama**, rendahnya literasi politik. Meskipun pemilih muda aktif di media sosial, banyak di antara mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pemilu, rekam jejak kandidat, maupun implikasi jangka panjang dari pilihan yang mereka buat. Mereka kerap berada dalam kategori floating mass yang mudah dipengaruhi oleh narasi populis, kampanye hitam, atau bahkan ajakan untuk golput. Pendidikan pemilih yang selama ini dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu masih cenderung bersifat teknis dan satu arah, terbatas pada informasi kapan, di mana, dan bagaimana proses memilih, tanpa cukup menyentuh makna substantif dari pilihan politik itu sendiri. **Kedua**, banjir informasi dan disinformasi. Justru karena terhubung erat dengan media sosial, pemilih muda menghadapi tantangan serius berupa information overflow yang menyulitkan mereka dalam menyaring informasi yang akurat dari hoaks atau framing yang menyesatkan. **Ketiga**, apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Sebagian besar generasi muda masih berada pada kategori pasif dalam keterlibatan politiknya, yang ditandai dengan rendahnya kehadiran di TPS maupun minimnya keterlibatan dalam proses kampanye. Data juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu secara statistik tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan untuk memilih, yang mengindikasikan adanya disonansi antara kepercayaan institusional dan perilaku elektoral aktual. **Keempat**, pendidikan pemilih yang belum menjangkau aspek substansial. (Zulkarnain & Saufi, 2021) menegaskan bahwa pendidikan pemilih yang substantif harus mencakup penguatan kesadaran kritis warga negara, kemampuan mengevaluasi rekam jejak kandidat secara rasional, serta membangun mentalitas anti politik uang. Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diinisiasi Bawaslu sejak 2018 menunjukkan tren menggembirakan dengan jumlah pendaftar meningkat dari 20 orang pada 2018 menjadi lebih dari 22.000 orang pada 2021, membuktikan bahwa minat anak muda terhadap pengawasan pemilu sesungguhnya cukup tinggi jika diberi ruang yang tepat. Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa pemilih muda bukan kelompok yang pasif atau tidak peduli. Mereka memiliki potensi besar sebagai agen perubahan demokrasi, namun potensi tersebut baru akan terealisasi secara optimal ketika didukung oleh ekosistem pendidikan politik yang kuat, pemberitaan media yang bertanggung jawab, serta strategi komunikasi politik yang jujur dan substantif dari para kandidat maupun penyelenggara pemilu (Hasan dkk., 2025). Lebih jauh, partisipasi politik pemilih muda tidak hanya menentukan hasil Pilpres, tetapi juga memengaruhi kualitas representasi politik dalam lembaga perwakilan. Tingginya keterlibatan pemilih muda dapat mendorong lahirnya representasi yang lebih responsif terhadap isu-isu generasi muda seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, transformasi digital, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, partisipasi politik menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fungsi representasi yang dijalankan oleh parlemen dalam sistem demokrasi Indonesia.

6. Efektivitas dan Dampak Suara Pemilih Muda Surabaya

Setelah memetakan pola dan saluran yang digunakan oleh kelompok muda dalam menyalurkan aspirasinya, pertanyaan krusial yang kemudian muncul adalah seberapa besar kontribusi nyata dari gerakan tersebut terhadap hasil akhir pemilu. Menakar efektivitas dan dampak suara pemilih muda di Kota Surabaya pada Pilpres 2024 tidak boleh hanya berhenti pada kalkulasi kuantitatif atau tingginya angka partisipasi masyarakat (partas) di atas kertas. Sebaliknya, efektivitas itu baru terwujud ketika kesadaran politik mereka yang kritis mampu melahirkan dampak elektoral yang signifikan, seperti munculnya fenomena pergeseran suara yang tidak terduga (*swing voters*) akibat respons mereka terhadap

performa paslon. Dampak ini tidak hanya berimbas pada angka kemenangan paslon tertentu di Kota Surabaya, melainkan juga memaksa partai politik dan tim pemenangan untuk merombak total strategi pendekatan kampanye mereka agar lebih akomodatif terhadap isu-isu fakta pemuda. Efektivitas partisipasi politik pemilih muda tidak semata diukur dari kehadiran fisik di bilik suara. (Budiardjo, 2008) menegaskan bahwa partisipasi politik yang substantif menuntut adanya tindakan sadar yang berorientasi pada upaya mengintervensi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka ini, pemilih muda Surabaya yang aktif mendiskusikan rekam jejak kandidat, mengkritisi program kerja paslon, dan menyebarkan informasi politik secara kritis di ruang digital sesungguhnya telah menjalankan fungsi partisipasi yang jauh melampaui sekadar ritual pencoblosan. Keterlibatan semacam ini mencerminkan kesadaran politik yang matang, sekaligus menjadi tekanan sosial yang mendorong para kandidat untuk lebih serius merespons aspirasi generasi muda dalam platform kampanye mereka.

Kualitas partisipasi tersebut juga tercermin dari bagaimana pemilih muda mengevaluasi kandidat secara multidimensional. Penelitian kuantitatif di Kota Medan menunjukkan bahwa hasil debat, rekam jejak kandidat, isu politik, dan kampanye merupakan variabel yang paling signifikan memengaruhi keputusan memilih anak muda, dengan hasil debat mencatatkan nilai pengaruh tertinggi di antara semua variabel yang diuji (Husniyah dkk., 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih muda tidak hanya merespons citra permukaan atau popularitas semata, melainkan juga menilai substansi dan kemampuan kandidat secara lebih mendalam. Pola evaluasi yang rasional seperti ini menjadi bukti bahwa suara pemilih muda bukan suara yang mudah dibeli atau dimobilisasi secara pragmatis, melainkan suara yang lahir dari pertimbangan yang lebih kritis dan terukur. Dari perspektif representasi politik, dampak partisipasi pemilih muda melampaui hasil Pilpres itu sendiri. Tingginya keterlibatan generasi muda dalam proses elektoral dapat mendorong lahirnya representasi politik yang lebih responsif terhadap isu-isu yang selama ini menjadi kegelisahan mereka, seperti lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, transformasi digital, dan isu lingkungan hidup. Dalam sistem demokrasi perwakilan, suara pemilih muda yang terkonsolidasi dengan baik memiliki kekuatan untuk memengaruhi komposisi lembaga legislatif sekaligus mendorong agenda kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan generasi muda (Budiardjo, 2008).

Dengan kata lain, efektivitas partisipasi mereka tidak berhenti pada hari pemungutan suara, melainkan terus bergema dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang terpilih. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang tidak bisa diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda masih berada pada kategori pemilih pasif yang belum optimal dalam memanfaatkan hak politiknya (Febrianta et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki pemilih muda Surabaya belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan elektoral yang terorganisir dan terarah. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan politik menjadi keniscayaan. Pendidikan politik yang substantif dan partisipatif tidak hanya mampu meningkatkan angka partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas pilihan yang dibuat oleh generasi muda sehingga suara mereka benar-benar menjadi instrumen perubahan yang bermakna dalam sistem demokrasi Indonesia (Hermanto dkk., 2025; Hasan dkk., 2025).

7. Partisipasi Pemilih Muda dan Implikasinya terhadap Representasi di Parlemen

Partisipasi politik pemilih muda dalam Pilpres 2024 tidak berhenti pada momen pencoblosan semata. Lebih dari itu, keterlibatan aktif generasi muda dalam proses elektoral memiliki implikasi yang jauh lebih luas terhadap kualitas representasi politik di lembaga perwakilan rakyat, termasuk di tingkat daerah seperti DPRD Kota Surabaya. Dalam sistem demokrasi perwakilan, parlemen mengemban fungsi utama

sebagai institusi yang menyuarakan kehendak rakyat, merumuskan kebijakan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi-fungsi tersebut baru dapat berjalan secara optimal apabila komposisi dan agenda parlemen benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang kini mendominasi struktur demografis pemilih di Kota Surabaya (Budiardjo, 2008). Sebagai kota metropolitan dengan DPT sebesar 2.218.586 pemilih pada Pilpres 2024, Surabaya menyimpan potensi elektoral pemilih muda yang sangat besar. Kelompok usia 17 hingga 30 tahun yang menempati posisi strategis sebagai swing voters di kota ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi DPRD Kota Surabaya untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang menjadi kegelisahan generasi Z dan milenial (Pradana, 2023).

Isu-isu seperti lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, transformasi digital, kesehatan mental, dan keberlanjutan lingkungan hidup selama ini masih kerap dipinggirkan dalam agenda legislasi daerah. Padahal, tingginya partisipasi pemilih muda Surabaya seharusnya menjadi modal politik yang kuat untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih berpihak pada kepentingan generasi penerus kota ini. Dalam konteks ini, suara pemilih muda bukan hanya instrumen untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga mekanisme untuk menentukan apa yang akan diperjuangkan oleh mereka yang berkuasa di kursi legislatif. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara besarnya proporsi pemilih muda di Surabaya dan tingkat keterwakilan mereka di DPRD Kota Surabaya. Generasi muda masih sangat minim terwakili di kursi legislatif daerah, sehingga kepentingan mereka seringkali tidak terartikulasikan secara optimal dalam proses perumusan kebijakan kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilu saja belum cukup untuk memastikan representasi yang substantif. Dibutuhkan kesadaran kolektif di kalangan pemilih muda Surabaya bahwa keterlibatan politik tidak berakhir setelah pemungutan suara, melainkan harus berlanjut melalui pengawasan aktif terhadap kinerja anggota DPRD yang telah mereka pilih. Sikap kritis yang ditampilkan pemilih muda Surabaya dalam mengevaluasi rekam jejak dan program kandidat selama Pilpres 2024 sesungguhnya mencerminkan kesadaran yang semakin tumbuh bahwa pilihan mereka di bilik suara akan berdampak langsung pada kualitas legislasi dan kebijakan daerah yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari di Surabaya. Karakteristik pemilih muda Surabaya yang vokal, adaptif terhadap teknologi, dan tidak memiliki pola afiliasi politik yang kaku justru menjadi aset penting dalam mendorong DPRD Kota Surabaya untuk lebih terbuka dan akuntabel terhadap aspirasi generasi muda (Winokan dkk., 2024). Oleh karena itu, pendidikan politik yang berkelanjutan menjadi sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan angka partisipasi pada hari pemungutan suara, tetapi juga untuk membangun generasi muda Surabaya yang mampu mengawal fungsi representasi parlemen secara aktif dan kritis pasca pemilu.

Dengan demikian, hubungan antara partisipasi pemilih muda Surabaya dan representasi di parlemen bersifat resiprokal. Di satu sisi, tingginya partisipasi pemilih muda dapat mendorong DPRD Kota Surabaya untuk lebih responsif terhadap aspirasi generasi muda dalam agenda legislasi daerah. Di sisi lain, parlemen daerah yang responsif dan transparan akan mendorong semakin banyak anak muda Surabaya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih yang kritis maupun sebagai calon legislator masa depan yang membawa perspektif generasi baru ke dalam ruang sidang parlemen. Siklus positif inilah yang pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi lokal Kota Surabaya secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kajian ini mengonfirmasi bahwa pemilih muda Kota Surabaya pada Pilpres 2024 bukan kelompok yang apatis, melainkan aktor politik yang kritis dan selektif. Partisipasi mereka tidak semata terwujud melalui kehadiran di TPS, tetapi juga melalui keterlibatan aktif di ruang digital mulai dari mengkritisi rekam jejak kandidat, memperbincangkan isu kebijakan, hingga membentuk opini publik secara mandiri. Dalam kerangka Budiardjo, pola ini melampaui partisipasi konvensional dan bergerak menuju dimensi yang lebih substantif: upaya sadar untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan elektoral yang terorganisir. Kesenjangan antara tingginya akses informasi digital dan rendahnya literasi politik yang kritis masih menjadi hambatan utama. Banjir disinformasi di media sosial, minimnya pendidikan pemilih yang substantif, serta ketidakpercayaan terhadap sistem secara kolektif menjadi faktor yang menahan efektivitas partisipasi dari sekadar kuantitas menuju kualitas yang sesungguhnya.

Dari sisi representasi, dominasi demografis pemilih muda di Surabaya belum berbanding lurus dengan keterwakilan mereka di lembaga legislatif daerah. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi elektoral semata tidak cukup dibutuhkan kesinambungan keterlibatan pasca-pemilu melalui pengawasan aktif terhadap kinerja wakil rakyat. Siklus demokrasi yang sehat mensyaratkan pemilih muda tidak hanya hadir saat pemungutan suara, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan yang konsisten dan kritis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal di Surabaya sangat bergantung pada investasi jangka panjang dalam pendidikan politik yang partisipatif, komunikasi politik yang jujur dari para kandidat, serta ekosistem informasi yang sehat. Ketika ketiga elemen tersebut terpenuhi, suara pemilih muda berpotensi menjadi instrumen transformasi demokrasi yang autentik, bukan sekadar angka partisipasi di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, N. D., Zusrieka, M., Pramesyanti, C. Z., Kahar, M., & Ramzy, M. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Studi Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi dan Faktor yang Mempengaruhinya*. 1, 1–10.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Febrianta, M., Buaton, R., & Sihombing, A. (2025). Klasterisasi Pemilih Muda Berdasarkan Minat Terhadap Pemilu dan Pilkada untuk Meningkatkan Partisipasi Generasi Z. *JISTI (Jurnal Informatika Dan Sistem Teknologi Informasi)*, 1(1), 48–57.
- Hasan, K., Igrisa, A., Djaba, M., & Mokodongan, R. (2025). Pendidikan Politik Pemilih Muda Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BHINNEKA*, 3(4), 689–698.
- Hermanto, B., Amrullah, F., Khu, S., & Permatasari, L. (2025). Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 3(7), 3683–3694.
- Husniyah, N., Br.Tarigan, D. E., & Siringoringo, Y. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Pemilih Usia Muda dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kota Medan menggunakan Regresi Logistik Biner. *PATTIMURA PROCEEDING: Conference of Science and Technology*, 5(1), 151–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/ppcst.2024.knmxxii.151-160>

- Jamil, R., Charlina, & Burhanuddin, D. (2024). Peran Pemilih Muda dalam Konstestasi Pemilihan Umum di Indonesia: Analisis Norman Fairclough. *Journal of Education Research*, 5(1), 95–105.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih*.
- KPU KOTA SURABAYA. (2023). *Klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berdasarkan Usia dan Generasi Tingkat Kota Surabaya untuk Pemilu Tahun 2024*. KPU KOTA SURABAYA. <https://kota-surabaya.kpu.go.id/blog/read/klasifikasi-daftar-pemilih-tetap-dpt-berdasarkan-usia-dan-generasi-tingkat-kota-surabaya-untuk-pemilu-tahun-2024>
- Maira, W. H., Az'ahra, N., Khobar, A. M., & Triantama, Z. (2025). Peran Iklan Tiktok dalam Mempengaruhi Pemilih Muda pada Pemilu 2024. *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)*, 5(2), 421–431.
- Mensana, F., & Lanang Sanjaya, E. (2020). *Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih : Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019*.
- Muthowif, Sofiyah, S. L., Fais, A., & Prihartanti, W. (2025). Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda Dalam Demokrasi: Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pada Pilkada Jawa Timur 2024. *Jurnal Bakti Kita*, 6(1), 120–128.
- Nugroho, A. S., Ramadhan, K. M., & Pasaribu, D. (2024). Pengaruh Faktor Geografis dalam Preferensi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. *Spatial: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 21(1), 55–65.
- Pradana, A. (2023). *KPU Surabaya Gencar Sosialisasi Pemilu 2024 Sasar Segmen Pemilih Pemula*. ANTARA JATIM. <https://jatim.antaranews.com/berita/733602/kpu-surabaya-gencar-sosialisasi-pemilu-2024-sasar-segmen-pemilih-pemula>
- Prasetyawati, A., & Satmoko Hadi, A. (2021). *PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KOTA SURABAYA*. 1704025400, 309–323.
- Ramdhan, B. (2023). *56 Persen Pemilih Pemilu 2024 dari kelompok Gen Z dan Milenial*. NEWS REPUBLIKA. <https://news.republika.co.id/berita/rx72ap330/56-persen-pemilih-pemilu-2024-dari-kelompok-gen-z-dan-milenial>
- Sahl, F. D., & Mauluddin, A. (2024). Political Elements as a Strategy to Capitalize on Voter Behavior in the 2024 Indonesia Presidential Election. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 6(1), 13–28. <https://doi.org/10.5148/jbo.v6i1.116>
- Setiawan, H. D. (2023). *PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI PEMILU 2024*. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201–213.
- Sukma, P., & Wardhani, N. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan*. 10(1), 57–62.
- Winokan, Z., Iqbal, F. M., & Fauzi, A. M. (2024). Rasionalitas Penggunaan Hak Suara Pemilih Pemula Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan (Pertama)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkarnain, H. M., & Saufi, A. (2021). *URGENSI PENDIDIKAN PEMILIH MUDA MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS*. *JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU*, 3(2), 154–173.